



ANALISIS PENGARUH PDB, DEMOGRAFI DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP *TAX EFFORT* DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Benny Gunawan Ardiansyah*

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan
bennygunawan.ardiansyah@pknstan.ac.id

Arrozaq Nugraha Putra

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta
arrozaqnugraha@hotmail.com

*Alamat Korespondensi: *bennygunawan.ardiansyah@pknstan.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to re-examine the significance of the relationship between gross domestic product (GDP) per capita, demographic factors and good governance with tax effort. The research employs quantitative methods with panel data involving 21 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) member countries from 2008 to 2017. Partially, GDP per capita has a significant positive effect on tax effort. Age dependency ratio shows insignificant effect. Meanwhile, good governance shows a significant negative effect. The robustness test, by decomposing GDP per capita based on the level of productivity, participation and proportion, shows two different findings. One the one hand, the transformation of the independent variables' significance is partial and the other hand there is no change in the significance of the model. Partial significant changes are seen when deconstructing the six sub-indices of good governance. The results of this study also confirm that the tax effort of APEC member countries, which declined after the 2008 economic crisis, has improved, although it has not returned to its previous level.

Keywords: Demography, Good Governance, PDB per Capita, Tax Effort

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali signifikansi hubungan antara produk domestik bruto (PDB) per kapita, faktor demografi dan *good governance* dengan *tax effort*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif pada data panel yang melibatkan 21 negara anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dari tahun 2008 hingga 2017. Secara parsial, PDB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap *tax effort*. Faktor demografi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan sedangkan *good governance* menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Hasil pengujian kekokohan model dengan melakukan dekomposisi PDB per kapita berdasarkan tingkat produktivitas, partisipasi, dan proporsi menunjukkan dua hal. Pertama, perubahan signifikansi variabel independen bersifat parsial. Kedua, signifikansi model secara keseluruhan tidak berubah. Perubahan signifikansi parsial terlihat saat dilakukan dekomposisi enam sub indeks *good governance*. Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa *tax effort* negara anggota APEC, yang menurun pasca krisis ekonomi 2008, sudah mengalami perbaikan meskipun belum kembali ke tingkat sebelum tahun 2008.

Kata kunci: Demografi, *Good Governance*, PDB per Kapita, *Tax Effort*

KLASIFIKASI JEL:

H21, J18, O50

CARA MENGUTIP:

Ardiansyah, B. G. & Putra, A. N. (2023). Analisis pengaruh PDB, demografi dan *good governance* terhadap *tax effort* di kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(1), 33-49.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030-2040. Total penduduk Indonesia tahun 2030-2040 diproyeksikan sekitar 297 juta jiwa, dimana 64% penduduk memiliki usia produktif; antara 15 hingga 64 tahun (BPS, 2018). Bonus demografi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian negara jika dapat dimanfaatkan secara efektif. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, dikhawatirkan justru akan menjadi bencana demografi. Hasil penelitian Jati (2015) menunjukkan bahwa bonus demografi di Indonesia belum cukup kuat mendorong sisi produksi. Banyak pekerja informal masih belum cukup kompetitif dalam industri strategis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang tepat agar pembangunan ekonomi berkelanjutan bisa tercapai untuk mencegah timbulnya bencana demografi ini.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menyatakan bahwa untuk menjadi kekuatan baru ekonomi dunia menjelang tahun 2030, mutlak diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu, fokus anggaran pendapatan dan belanja negara adalah memberikan kesempatan dalam hal investasi sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Akan tetapi, kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada belanja negara. Lebih dari itu, pendapatan dan pengeluaran negara, termasuk pembiayaan, merupakan instrumen fiskal yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan proses pembangunan. Pendapatan perpajakan menjadi komponen utama dari ruang fiskal suatu negara sedangkan dalam pembiayaan pengeluaran publik diperlukan elemen kunci seperti akuntabilitas antara pemimpin dan penduduk (Brun & Diakite, 2016).

Todaro & Smith (2015) menyatakan bahwa sumber daya untuk membiayai barang publik seharusnya berasal dari sisi pendapatan alih-alih meningkatkan utang. Meskipun utang publik domestik maupun asing memang dapat mengisi beberapa celah defisit anggaran, dalam jangka panjang, pengumpulan pajak yang efisien dan berkeadilan harus menjadi dasar pembiayaan pembangunan oleh pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *tax effort*, yaitu indeks rasio antara bagian pengumpulan pajak yang sebenarnya dalam produk domestik bruto (PDB) dan kapasitas kena pajak (*taxable capacity*). Pendekatan *tax effort* digunakan sebagai besaran pengumpulan pajak aktual apabila dibandingkan dengan *tax capacity* (Le et al., 2012).

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Harus dapat memanfaatkan bonus demografi untuk mewujudkan kesinambungan pendapatan negara dalam jangka panjang
- Menjaga tren positif (kenaikan) pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita pada tingkat yang stabil. Resesi ekonomi akibat pandemi pada kurun waktu 2020-2021 terbukti menurunkan *tax efforts*
- Melanjutkan reformasi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*. Jumlah penduduk yang banyak, tanpa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan *good governance*, tidak akan bermanfaat bagi kesinambungan pendapatan negara dalam jangka panjang

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, kebutuhan belanja publik yang kian tumbuh juga harus diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan dari perpajakan. Bird et al. (2014) menyatakan bahwa banyak negara berkembang menghadapi masalah keuangan dan membutuhkan belanja lebih besar untuk infrastruktur publik, layanan kesehatan dan pendidikan sehingga harus meningkatkan *tax effort*-nya agar bisa tumbuh dan mengurangi kemiskinan.

Penelitian Le et al. (2008, 2012) mengelompokkan negara-negara di dunia sesuai kelompok tingkat *tax collection* dan *tax effort*. Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan *low collection* dan *low effort*. Artinya, penerimaan pajak Indonesia yang rendah saat ini masih di bawah tingkat kapasitas pajak. Negara-negara dalam kategori *low collection* dan *low effort* disarankan untuk terus melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang komprehensif dan mengupayakan reformasi administrasi perpajakan.

Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Asia Pasifik dan sudah tergabung dalam *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). APEC adalah suatu forum ekonomi Asia Pasifik, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini akan melakukan perbandingan kebijakan fiskal antarnegara anggota APEC, terutama terkait kebijakan fiskal terkait pendapatan negara. Penelitian ini diharapkan dapat menilai sejauh mana kinerja perpajakan di Indonesia, bila dibandingkan dengan negara lain.

Secara umum, negara-negara anggota APEC tidak mampu mengimbangi laju peningkatan PDB dengan dengan peningkatan penerimaan pajak secara proporsional. Hasil penelitian Bird et al. (2014) menjelaskan fenomena ini dengan melihat

fakta bahwa hanya sedikit negara yang memiliki kemampuan melakukan pemungutan pajak sesuai kapasitasnya. Kenaikan pada basis pajak tidak serta merta dapat dikonversi menjadi penerimaan pajak.

Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax effort* telah dilakukan untuk mendapatkan penjelasan berdasarkan bukti empiris. Bahl (1972), Tanzi (1992), Le et al. (2008), Feger & Asafu-Adjaye (2014) serta Bird et al. (2014) telah mencoba menemukan faktor-faktor yang dianggap dapat berpengaruh pada *tax effort*, di antaranya adalah tingkat pengembangan negara, struktur ekonomi, keterbukaan perdagangan internasional, dan karakter demografi.

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, berbagai penelitian telah mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi *demand*, termasuk beberapa determinan baru: kualitas peraturan, penanganan korupsi hingga kualitas birokrasi. Hasil-hasil penelitian Le et al. (2008, 2012), Bird et al. (2008, 2014), Cyan et al. (2013) serta Elbahnasawy (2020) menunjukkan bahwa kualitas barang publik, tata kelola, dan institusi merupakan determinan yang akan berpengaruh terhadap *tax morale*. Cyan et al. (2013) menambahkan bahwa institusi dengan kualitas tata kelola yang buruk juga dianggap berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada kemampuan untuk memungut pajak.

Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax effort* dapat digunakan oleh pemerintah dalam mempersiapkan mitigasi risikonya. Salah satunya melalui pemanfaatan keuntungan menjadi anggota APEC bagi Indonesia, dimana mampu menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemerintah dan perwakilan ekonomi negara lain.

Salah satu upaya yang perlu dipikirkan adalah peningkatan kapasitas pajak negara anggota APEC untuk dapat menciptakan keberlanjutan penerimaan pajak dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini akan menguji determinan-determinan yang memengaruhi *tax effort* suatu negara. Determinan yang akan diuji adalah karakter demografi, determinan sisi *supply* (nilai PDB per kapita) dan faktor *demand* (*good governance*).

STUDI LITERATUR

Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa secara umum, potensi pajak suatu negara tergantung pada tingkat pendapatan per kapita, tingkat ketimpangan, struktur ekonomi, kondisi sosial politik, dan kelembagaan hingga kompetensi, integritas serta kejujuran otoritas perpajakan suatu negara. Penelitian awal tentang *tax effort* berfokus pada sisi *supply* seperti nilai PDB per kapita (Bird et

al., 2008), faktor perdagangan internasional (ekspor dan impor) terhadap PDB (Bahl, 1972), pengaruh sektoral pertanian, pertambangan, dan manufaktur terhadap PDB (Tanzi, 1992), serta peran administrasi perpajakan (Feger & Asafu-Adjaye, 2014).

Kemudian, mulai tahun 2000-an, penelitian-penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *tax effort* berkembang dari sisi *demand*, seperti pengendalian korupsi dan akuntabilitas publik oleh Le et al. (2008). Kemudian faktor kualitas institusi, kesenjangan, dan stabilitas politik juga berpengaruh signifikan terhadap *tax effort* sebagaimana hasil penelitian Bird et al. (2008). Beberapa peneliti kemudian melakukan pengujian determinan *tax effort*, baik dari sisi *supply* maupun *demand*, sebagaimana dilakukan oleh Le et al. (2012), Cyan et al. (2013), Bird et al. (2014) serta Elbahnasawy (2020).

Dari sisi *supply*, hampir seluruh penelitian menemukan bahwa tingkat berkembangnya suatu negara yang diwakili oleh pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sudah dibuktikan oleh Bahl (1972), Tanzi (1992), Le et al. (2008), Feger & Asafu-Adjaye (2014) serta Bird et al. (2014).

Hasil penelitian Bahl (1972) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dapat menggambarkan seberapa berkembangnya suatu negara akan memperluas *tax base* sekaligus *tax capacity*. Semakin tinggi tingkat pengembangan ekonomi suatu negara maka semakin tinggi kapasitas pajak negara tersebut.

Bird et al. (2014) menggunakan PDB per kapita sebagai proksi tingkat pengembangan suatu negara. Semakin baik pengembangan suatu negara, maka kapasitas pajak akan semakin meningkat sehingga penerimaan pajak akan lebih tinggi. Selanjutnya, penelitian Golley & Wei (2015) melakukan dekomposisi pendapatan per kapita berdasarkan tiga komponen, yaitu tingkat produktivitas, tingkat partisipasi dan tingkat proporsi.

Salah satu sisi *supply* adalah faktor *human capital* yang dapat diterjemahkan sebagai karakter demografi. Menurut kamus Merriam-Webster, demografi didefinisikan sebagai studi statistik populasi manusia, terutama dengan mengacu pada ukuran dan kepadatan, distribusi, dan statistik vital. Berdasarkan hal tersebut, demografi dapat diartikan dengan menggunakan berbagai cara pengukuran untuk menjelaskan karakter suatu populasi. Dalam konteks bonus demografi, karakter demografi biasanya diukur dengan *age dependency ratio*.

Penelitian yang dilakukan oleh Le et al. (2008), Bird et al. (2008, 2014), serta Feger & Asafu-Adjaye (2014) menggunakan karakter demografi yang

memengaruhi *tax effort* karena menentukan seberapa banyak penduduk yang mampu membayar pajak dengan sukarela. Penelitian Bird et al. (2008) yang berlanjut dengan Bird et al. (2014) menunjukkan bahwa faktor demografi merupakan determinan penting dalam *tax effort*. Semakin tingginya pertumbuhan populasi akan berdampak negatif terhadap *tax effort* suatu negara.

Hasil penelitian Bahl (1972) menunjukkan hal yang sama. Negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi akan menyulitkan otoritas pajak untuk menangkap adanya pembayar pajak yang baru. Hasil tersebut diperkuat dengan penelitian Le et al. (2012) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi bersama dengan *age dependency* yang lebih tinggi diduga akan mendistorsi kapasitas pengumpulan pajak negara.

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Garg et al. (2016) serta Mawejje & Sebudde (2019), menggunakan berbagai proksi selain pertumbuhan populasi dan *age dependency* untuk menguji korelasi karakteristik demografi dengan *tax effort*. Proksi-proksinya berupa populasi pedesaan, *urban gini*, *literacy rate* atau yang lainnya. Perbandingan penduduk perkotaan dengan total populasi berkorelasi positif dengan pertumbuhan populasi. Sebagian besar kegiatan sektor publik berbasis kota sehingga perlu memperbanyak penduduk sektor pedesaan untuk mengurangi permintaan sektor publik, berupa layanan pemerintah.

Pelaksanaan layanan publik merupakan indikator untuk mengukur kinerja institusi pemerintah atau *good governance*. Dalam hal ini, penggunaan variabel layanan publik yang dilakukan terhadap masyarakat (populasi) perkotaan menjadi sangat penting dalam penelitian sebagaimana digunakan oleh Tanzi (1992) dan Newton (2017). Masyarakat perkotaan dianggap lebih banyak menuntut adanya permintaan layanan publik dibandingkan masyarakat pedesaan. Penggunaan proksi populasi perkotaan sendiri dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja institusi pemerintah atau *good governance*.

Sementara itu, Le et al. (2012) berpendapat bahwa negara dapat memungut pajak yang lebih tinggi hanya jika proses pemungutan pajak efisien. Dalam hal ini, indeks kualitas birokrasi dan indeks korupsi, yang merupakan dua kemungkinan ukuran kualitas kelembagaan dan tata kelola, diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap pengumpulan pajak.

Cyan et al. (2013) berpendapat bahwa kualitas barang publik, tata kelola dan institusi dapat memengaruhi *tax morale*. Institusi dengan kualitas tata kelola yang buruk berpengaruh langsung terhadap kemampuan untuk memungut pajak. Dengan demikian, *good governance* juga berpengaruh terhadap *tax effort*. Jika korupsi marak

dan kepercayaan terhadap otoritas publik rendah maka tidak akan menghasilkan *tax ratio* yang lebih tinggi.

Penelitian oleh Daude et al. (2013) tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax morale* di negara berkembang membuktikan bahwa faktor sosial ekonomi seperti usia, agama, jenis kelamin, status pekerjaan dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *tax morale* masyarakat. Sedangkan dari segi determinan kelembagaan maka kepuasan terhadap demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah dan kepuasan terhadap kualitas pelayanan publik memiliki peranan penting. Untuk meningkatkan *tax morale* yang bertujuan untuk meningkatkan *tax ratio*, dapat dilakukan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang memadai.

Elbahnasawy (2020) dapat membuktikan secara empiris tentang hubungan antara lingkungan politik dan *tax effort* serta pendapatan di negara-negara yang bergantung pada hidrokarbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola otoritas demokratis dan stabilitas politik dikaitkan dengan *tax effort* yang lebih besar dan pendapatan dari sumber non-hidrokarbon. Penelitian tersebut fokus dengan determinan faktor-faktor stabilitas politik yang memengaruhi *tax effort* di negara penghasil hidrokarbon.

Selanjutnya, penelitian oleh Mawejje & Sebudde (2019) berdasarkan sektor ekonomi. Penelitian tersebut dilakukan dengan membuat perkiraan potensi dan *tax effort* dalam data panel dari 150 negara di seluruh dunia dengan menggunakan metode *stochastic frontier*. Hasilnya menunjukkan bahwa negara yang dapat menghasilkan penerimaan pajak mendekati potensi pajaknya memiliki karakteristik tingkat pendapatan yang tinggi, sektor non pertanian yang besar, kontribusi perdagangan terhadap PDB yang besar, banyak berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, memiliki sektor keuangan maju, perekonomian domestik yang lebih stabil (inflasi rendah), populasi yang lebih urban, dan korupsi yang lebih rendah.

Pendekatan yang sama (dengan metode *stochastic frontier*) dilakukan sebelumnya oleh Ndiaye & Korsu (2014) dengan tujuan untuk mobilisasi penerimaan pajak bagi negara komunitas ekonomi di Afrika Barat atau *The Economic Community of West African States* (ECOWAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax effort* semua negara ECOWAS berada di bawah kapasitas pajaknya.

Penelitian selanjutnya dilakukan dengan lebih pragmatis. Penelitian Javid & Arif (2012) mencari hubungan antara *tax effort* dengan PDB per kapita, derajat keterbukaan, komposisi sektoral PDB sektor pertanian, rasio utang terhadap PDB, pertumbuhan

populasi, inflasi, tingkat korupsi, tingkat kualitas birokrasi, dan tingkat kualitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat PDB per kapita, derajat keterbukaan, rasio utang terhadap PDB, tingkat kualitas birokrasi, dan tingkat kualitas hukum berhubungan positif dengan *tax effort*. Sementara itu, semakin tinggi pertumbuhan populasi, inflasi, dan tingkat korupsi berhubungan negatif dengan *tax effort*.

Sedangkan penelitian Fenochietto & Pessino (2013) mencari hubungan antara *tax effort* dengan PDB per kapita, derajat keterbukaan, komposisi sektoral PDB sektor pertanian, pengeluaran publik sektor pendidikan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat korupsi. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran publik sektor pendidikan, derajat keterbukaan, dan PDB per kapita berhubungan positif dengan *tax effort*. Sementara itu, semakin tinggi tingkat korupsi, komposisi sektoral PDB sektor pertanian, dan ketimpangan distribusi pendapatan berhubungan negatif dengan *tax effort*.

Penelitian Grigorian & Davoodi (2007) juga mencari hubungan antara *tax effort* dan variabel independen yakni PDB per kapita, *institutional quality*, inflasi, komposisi sektoral PDB sektor pertanian, derajat keterbukaan, *urban population*, pengeksport minyak, dan *shadow economy*. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat PDB per kapita, *institutional quality*, *urban population*, dan derajat keterbukaan berhubungan positif dengan *tax effort*. Pada sisi lain, semakin tinggi tingkat inflasi, pengeksport minyak dan *shadow economy* berhubungan negatif dengan *tax effort*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengamati determinan dari *tax effort* di negara-negara anggota APEC. Determinan tersebut adalah PDB per kapita, karakter demografi, dan *good governance*. Jangka waktu penelitian adalah satu dekade antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Objek dari penelitian ini meliputi seluruh negara anggota APEC termasuk Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Pembatasan objek bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor lain yang mungkin bisa berpengaruh seperti masalah geografis dan budaya.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari *Worldwide Governance Indicators*, *Worldwide Development Indicators*, *World Longitudinal Data* IMF, *UNCTAD Statistics* dan otoritas statistik masing-masing negara bersangkutan. *Tax effort* dalam penelitian ini didefinisikan sebagaimana yang dinyatakan Le et al.

(2012) serta Bird et al. (2014), yaitu diukur dari persentase penerimaan pajak terhadap PDB.

PDB per kapita, merupakan ukuran dari tingkat pengembangan ekonomi suatu negara. Variabel ini diukur dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk. PDB per kapita yang digunakan berdasarkan *Purchase Power Parity* (PPP). PDB PPP adalah PDB yang dikonversi ke dolar internasional menggunakan tingkat paritas daya beli. Dolar internasional memiliki daya beli yang sama terhadap PDB seperti dolar AS di Amerika Serikat. PDB atas dasar harga pembeli adalah jumlah dari nilai kotor yang ditambahkan oleh semua produsen dalam perekonomian ditambah pajak produk apapun dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam nilai produk. Untuk tujuan pengolahan data, PDB per kapita dihitung dengan *log natural*.

Demografi merupakan karakteristik kependudukan suatu negara. Variabel ini diukur dengan *age dependency ratio*. Rasio ketergantungan usia yang digunakan adalah rasio tanggungan dari orang yang lebih muda dari 15 tahun atau lebih tua dari 64 tahun terhadap populasi usia kerja (usia 15-64). Data ditampilkan sebagai proporsi tanggungan per 100 populasi usia kerja.

Untuk mempermudah mengukur kualitas tata kelola dan institusional berbagai negara, Kaufmann et al. (2011) mengembangkan *World Governance Index* (WGI). Indeks ini mencakup enam dimensi pengukuran termasuk *voice and accountability*, *political stability and absence of violence/terrorism*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption*. Keenam dimensi tersebut dianggap dapat mewakili kualitas barang publik termasuk kualitas tata kelola dan institusional. WGI disajikan dalam rentang -2,5 hingga +2,5.

Berdasarkan hipotesis yang dibangun dalam landasan teori dan variabel-variabel di atas, maka model penelitian adalah:

$$TE_{it} = \alpha_0 + \beta_1 GDPPC_{it} + \beta_2 DEMOG_{it} + \beta_3 GOV_{it} + \beta_4 TRADE_{it} + \beta_5 SECTOR_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

TE : *tax effort*;

GDPPC : Pendapatan penduduk yang diwakili oleh PDB per kapita;

DEMOG : Karakteristik demografi;

GOV : *Good governance*;

TRADE : Keterbukaan perekonomian dilambangkan (ekspor + impor)/PDB;

SECTOR: Komposisi sektoral PDB sektor pertanian terhadap PDB;

i : Negara anggota APEC

t : Tahun observasi 2008-2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif Penelitian

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Observations</i>	Sumber Data
TE	18,394	17,2045	42,1019	9,0585	5,9625	210	<i>Worldwide Governance Indicators, Worldwide Development Indicators,</i>
GDPPC	29.558	22.930	93.981	2.657	22.050	210	<i>World Longitudinal Data</i>
DEMOG	46,4805	45,6821	72,4651	26,9906	9,9036	210	IMF, UNCTAD <i>Statistics</i>
GOV	0,5059	0,6208	1,8619	-0,7592	0,8772	210	dan otoritas statistik
SECTOR	6,2208	3,8454	22,387	0,0262	5,9885	210	masing-masing negara
TRADE	107,0827	65,6382	442,62	24,4909	97,6001	210	bersangkutan

Sumber: Diolah Penulis

Analisis statistik deskriptif dalam hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dari data yang menjadi sampel penelitian tanpa mengambil kesimpulan dari gambaran tersebut. Analisis ini bertujuan agar data yang disajikan bisa mudah dipahami dan informatif. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data dalam beberapa karakteristiknya yakni, nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan baku (*standard deviation*). Analisis statistik deskriptif data penelitian ini tersaji dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa variabel *tax effort* (TE) memiliki rata-rata senilai 18,3940; nilai tengah 17,2045; nilai maksimum 42,1019; dan nilai minimum 9,0585. Variabel TE disajikan dalam rasio antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai *tax effort* yang dengan rentang nilai yang tinggi sampai rendah dalam penelitian ini menunjukkan keberagaman sampel yang diambil. Sampel yang diambil mencakup negara berkembang dengan *tax effort* sedang hingga negara yang memiliki *tax effort* tinggi. Data rincian *tax effort* negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 1 (a, b, c).

Variabel GDPPC dinyatakan dalam satuan dolar Amerika Serikat pada harga internasional kini sesuai PPP. Variabel ini memiliki rata-rata sebesar 29,558; nilai tengah 22,930; nilai maksimum 93,981; dan nilai minimum 2,657.

Variabel DEMOG dinyatakan dalam rasio ketergantungan usia penduduk (*age dependency ratio*) yang diukur rasio tanggungan dari orang yang lebih muda dari 15 tahun atau lebih tua dari 64 tahun terhadap populasi usia kerja (usia 15-64). Variabel ini memiliki nilai rata-rata 46,4805; nilai tengah sebesar 45,6821; nilai maksimum 72,4651; dan nilai minimum sebesar 26,9906.

Variabel GOV dinyatakan dalam skala antara nilai minimal -2,5 hingga maksimal 2,5 yang diperoleh dari rata-rata enam sub indikator pada WGI. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 0,5059;

nilai tengah sebesar 0,6208; nilai maksimum 1,8619; dan nilai minimum sebesar -0,7592.

Variabel SECTOR dinyatakan dalam bentuk persentase PDB dari sektor pertanian terhadap total PDB. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 6,2208; nilai tengah sebesar 3,8454; nilai maksimum 22,3870; dan nilai minimum sebesar 0,0262.

Variabel TRADE dinyatakan dalam bentuk rasio antara nilai ekspor dan impor terhadap PDB. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 107,0827; nilai tengah sebesar 65,6382; nilai maksimum 442,6200; dan nilai minimum sebesar 24,4909.

Perbandingan *Tax Effort* Antarnegara

Jika *tax ratio* adalah penerimaan pajak sebagai fungsi pendapatan, maka *tax effort* dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu negara menggunakan *taxable capacity*, yaitu rasio pengumpulan pajak aktual dengan *tax capacity*. Untuk menentukan peringkat negara berdasarkan upaya pajak, rasio pajak diasumsikan sebagai fungsi dari dua faktor umum: kapasitas kena pajak ((T/Y)) dan *tax efforts* (E). Persamaan regresinya adalah:

$$\frac{T}{Y} = f\left(\frac{T}{Y}, E\right) \quad (2)$$

Bahl (1972) menggunakan konsep *tax effort approach*, yaitu rasio dari penerimaan pajak sebenarnya terhadap estimasi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh atau *taxable capacity*, yang diukur dengan formulasi:

$$E = \left(\frac{T}{Y}\right) / \left(\frac{T}{Y}\right) \quad (3)$$

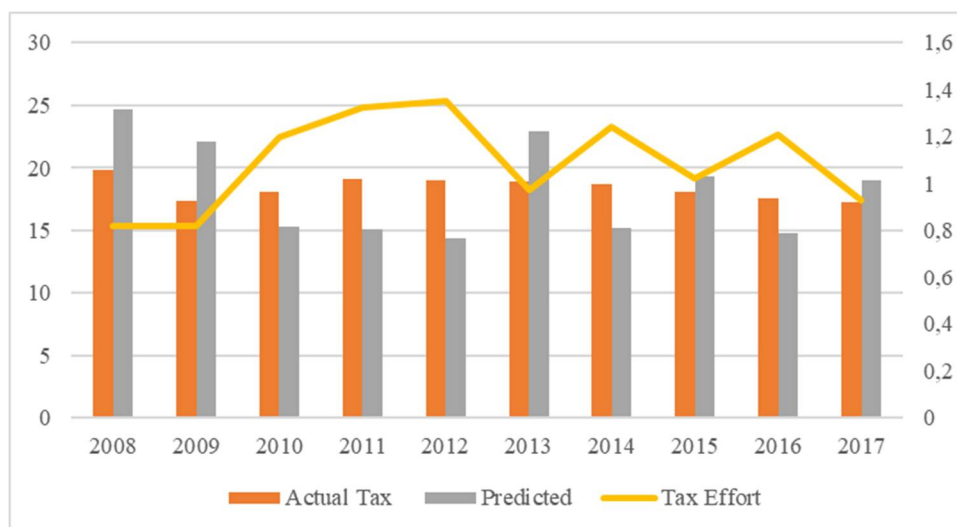
T/Y adalah rasio pajak aktual dan T'/Y adalah estimasi rasio pajak yang diperoleh dari persamaan (2). Langkah pertama dalam analisis statistik adalah memperkirakan *taxable capacity* suatu negara dengan menggunakan hanya variabel yang dapat diklasifikasikan dengan benar sebagai faktor non-

Gambar 1 Perbandingan Rata-Rata *Tax Effort* per Negara Anggota APEC



Sumber: Diolah Penulis

Gambar 2 Perbandingan Rata-Rata *Tax Effort* Negara Anggota APEC 2008-2017



Sumber: Diolah Penulis

effort. Hasil perkiraan *tax capacity* dan *tax effort* untuk seluruh negara anggota APEC dalam rentang waktu tahun 2008-2017 disajikan pada Lampiran 1 (a, b, c).

Sementara itu, perbandingan rata-rata *tax effort* per negara anggota APEC dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam perbandingan antarnegara ini, rata-rata *tax effort* tertinggi diperoleh Selandia Baru sebesar 1,7514 dan terbesar pada 2012 sebesar 2,7473. Rata-rata *tax effort* terendah ada di Indonesia sebesar 0,6898 dan hanya memperoleh 0,4161 pada 2009.

Hasil penelitian oleh Piancastelli & Thirlwall (2021) terhadap pengukuran *tax effort* di 59 negara maju dan berkembang selama periode 1996 – 2015 menunjukkan bahwa *tax effort* tertinggi dihasilkan oleh Afrika Selatan, sementara terendah adalah Swiss. Dengan demikian, status negara maju atau berkembang tidak dapat dikaitkan dengan tingkat *tax effort*-nya.

Sedangkan perkembangan *tax effort* negara-negara APEC dari tahun 2008 hingga 2017 cenderung menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan dalam

Tabel 2 Klasifikasi Negara APEC Berdasarkan Penerimaan Pajak dan *Tax Effort*.

		<i>Tax Efforts</i>	
		Rendah	Tinggi
Penerimaan Pajak	Rendah	Hongkong; Filipina; Indonesia; Singapura; Jepang; Taiwan; Meksiko Malaysia; Peru	
	Tinggi		Australia; Korea Sltn; Brunei; Selandia Baru; Kanada; Russia; Chile; USA; Tiongkok; Vietnam

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	0,881934
<i>Adjusted R-squared</i>	0,865892

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 4 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

<i>F-statistic</i>	54,9780
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,0000

Sumber: Diolah Penulis

Gambar 2. Le et al. (2012) telah mengidentifikasi tren penurunan *tax effort* dalam rentang observasi tahun 1994 – 2009. Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi selama tahun 2008 – 2009 mengakibatkan kegiatan ekonomi menurun secara signifikan hampir di setiap negara. Krisis ini diekspektasikan dapat memberi dampak negatif bagi penerimaan pajak. Pada saat yang sama, banyak pemerintah memperkenalkan paket stimulus termasuk langkah-langkah untuk menurunkan pajak, sehingga menambah tekanan pada penerimaan pajak.

Tabel 2 menunjukkan pembagian negara-negara anggota APEC dalam klasifikasi penerimaan rendah dan tinggi serta *tax effort* rendah dan tinggi seperti yang dilakukan Le et al. (2012). Penerimaan

pajak diklasifikasikan rendah jika rata-rata penerimaannya kurang dari median data penerimaan pajak selama 2008 – 2017 yaitu 17,2045 dan diklasifikasikan penerimaan pajak tinggi jika lebih tinggi. Selanjutnya, negara-negara dengan nilai *tax effort* kurang dari satu diklasifikasikan sebagai negara dengan *tax effort* rendah dan sebaliknya, negara dengan *tax effort* lebih dari satu diklasifikasikan sebagai negara dengan *tax effort* tinggi seperti Tabel 2.

Hasilnya tidak berbeda dengan klasifikasi yang dilakukan Le et al. (2008, 2012), Indonesia termasuk dalam klasifikasi penerimaan pajak rendah dan *tax effort* rendah. Hasil klasifikasi juga menunjukkan tidak ditemukannya negara dengan *tax effort* yang rendah namun penerimaan pajaknya tinggi.

Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) disajikan dalam Tabel 3.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,881934. Artinya kemampuan variabel independen dan variabel kontrol dalam menjelaskan variasi variabel dependen berada di angka 88,1934% sedangkan sisanya sebesar 11,8066% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dicakup dalam penelitian ini.

Sementara itu, hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F) ditunjukkan pada Tabel 4.

Dengan persamaan regresi sebesar 54,9780 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menolak H_1 sehingga H_1 diterima. Oleh karena itu, dari uji *F-statistic* dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Sedangkan hasil uji T, secara *default* aplikasi tersebut akan memberikan hasil pengujian statistik dengan prinsip *two-tailed hypothesis* (Agung, 2014). Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian dengan *one-tailed hypothesis* dalam penelitian ini. Solusi atas masalah tersebut dapat dilakukan dengan membagi dua nilai signifikansi/probabilitas yang dihasilkan oleh aplikasi pengolahan data statistik tersebut. Hasil uji t dapat dilihat pada Lampiran 2.

Berdasarkan hasil uji t pada Lampiran 2, nilai probabilitas (*p-value* dari statistik uji F) variabel GDPPC sebesar 0,037; nilai ini kemudian dibagi dua untuk menyesuaikan prinsip *one-tailed*, sehingga diperoleh nilai sebesar 0,0185. Nilai probabilitas < alpha 0,05 sehingga H_1 diterima, atau dengan kata lain variabel GDPPC merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel TE.

Variabel DEMOG memiliki nilai probabilitas sebesar 0,136; nilai ini kemudian dibagi dua untuk

menyesuaikan prinsip *one-tailed*, sehingga diperoleh nilai sebesar 0,068. Nilai probabilitas $>\alpha$ 0,05 sehingga H_1 ditolak, atau dengan kata lain variabel DEMOG bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel TE.

Variabel GOV memiliki nilai probabilitas sebesar 0,04. Nilai ini kemudian dibagi dua untuk menyesuaikan prinsip *one-tailed*, sehingga diperoleh nilai sebesar 0,02. Nilai probabilitas $<\alpha$ 0,05 sehingga H_1 diterima, atau dengan kata lain variabel GOV merupakan penjelas signifikan terhadap variabel TE.

Variabel SECTOR memiliki nilai probabilitas sebesar 0,004; nilai ini kemudian dibagi dua untuk menyesuaikan prinsip *one-tailed*, sehingga diperoleh nilai sebesar 0,002. Nilai probabilitas $>\alpha$ 0,05 sehingga H_1 diterima, atau dengan kata lain variabel SECTOR merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel TE.

Variabel TRADE memiliki nilai probabilitas sebesar 0,007; nilai ini kemudian dibagi dua untuk menyesuaikan prinsip *one-tailed*, sehingga diperoleh nilai sebesar 0,0035. Nilai probabilitas $<\alpha$ 0,05 sehingga H_1 diterima, atau dengan kata lain variabel TRADE merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel TE.

Dengan demikian, hasil model persamaan regresi adalah

$$TE_{it} = 1,464463 + 0,204878 \text{ GDPPC}_{it} + 0,457729 \text{ DEMOG}_{it} - 0,829921 \text{ GOV}_{it} + 0,366987 \text{ TRADE}_{it} - 0,600936 \text{ SECTOR}_{it} + \varepsilon \quad (4)$$

Atau dapat diinterpretasikan:

$\alpha = 1,464463$ merupakan konstanta/intersep regresi yang dapat diartikan bahwa ketika semua variabel independen dan variabel kontrol bernilai nol, maka nilai TE akan bernilai 1,464463;

$\beta_1 = 0,204878$ koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara variabel independen PDB per kapita dan variabel dependen *tax effort*. Dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor lain yang memengaruhi *tax effort* dianggap tetap), setiap kenaikan GDPPC sebesar satu satuan, yang mana merupakan *log natural* dari PDB per kapita, maka *log natural* TE akan naik sebesar 0,204878 satuan.

$\beta_2 = 0,457729$ koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara variabel independen demografi dan variabel dependen *tax effort*. Dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor lain yang memengaruhi *tax effort* dianggap tetap), setiap kenaikan DEMOG sebesar satu satuan, yang mana merupakan *log natural* rasio ketergantungan usia (ADR), maka *log natural* TE akan naik sebesar 0,457729 satuan.

$\beta_3 = -0,829921$ koefisien bertanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah antara

variabel independen *governance quality* dan variabel dependen *tax effort*. Dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor lain yang memengaruhi *tax effort* dianggap tetap), setiap kenaikan GOV sebesar satu satuan, yang mana merupakan *log natural* rata-rata dari *Worldwide Governance Index*, maka *log natural* TE akan turun sebesar 0,829921 satuan.

$\beta_4 = 0,366987$ koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara variabel kontrol derajat keterbukaan perdagangan internasional dan variabel dependen *tax effort*. Dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor lain yang memengaruhi *tax effort* dianggap tetap), setiap kenaikan TRADE sebesar satu satuan, yang mana merupakan *log natural* jumlah rasio ekspor dan impor terhadap PDB, maka *log natural* TE akan naik sebesar 0,366987 satuan.

$\beta_5 = -0,600936$ koefisien bertanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan antara variabel kontrol komposisi sektor agrikultur dan variabel dependen *tax effort*. Dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor lain yang memengaruhi *tax effort* dianggap tetap), setiap kenaikan SECTOR sebesar 1 satuan, yang mana merupakan *log natural* bagian agrikultur dari PDB, maka *log natural* TE akan naik sebesar 0,600936 satuan.

Pengaruh PDB per Kapita terhadap *Tax Effort*

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk pengaruh PDB per kapita terhadap *tax effort* adalah 0,01035. Nilai tersebut berada di bawah tingkat signifikansi yakni 5% sehingga disimpulkan bahwa PDB per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap *tax effort*, dan memiliki pengaruh yang positif. Simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini mendukung pernyataan Le et al. (2008, 2012). PDB per kapita merupakan sebuah faktor yang berdampak signifikan pada kemampuan suatu negara dalam pengumpulan pajak.

Bahl (1972) menjelaskan PDB per kapita atau pendapatan per kapita menunjukkan tahapan perkembangan suatu negara yang mengukur kemampuan negara tersebut dalam mengumpulkan pajak. Feger & Asafu-Adjaye (2014) berpendapat bahwa PDB per kapita atau jenis pendapatan per kapita lainnya biasanya dapat menjadi proksi penjelas terbaik untuk tingkat perkembangan kesejahteraan suatu negara. Dari berbagai penelitian perbandingan *tax effort* sebelumnya Tanzi (1992), Le et al. (2008), Feger & Asafu-Adjaye (2014), serta Bird et al. (2014), PDB per kapita hampir selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap *tax effort*. Dari penelitian-penelitian tersebut, hanya Bird et al. (2008) serta Bird et al. (2014) yang menunjukkan arah pengaruh yang beragam.

Hasil menarik ditunjukkan ketika PDB per kapita dijabarkan dalam tiga ukuran penjelasnya (tingkat produktivitas, tingkat partisipasi, dan tingkat proporsi) seperti yang dilakukan oleh Golley & Wei (2015). Pendekatan ini juga dilakukan oleh Effendi et al. (2019).

Penelitian ini juga melakukan dekomposisi PDB per kapita terkait tiga variabel penjelas yaitu tingkat produktivitas, partisipasi, dan proporsi. Hasil regresi menunjukkan pengaruh yang beragam dengan nilai probabilitas sebesar 0,857; 0,238; dan 0,052. Nilai ini kemudian dibagi dua sesuai prinsip *one-tailed*, sehingga diperoleh nilai sebesar 0,429; 0,119, dan 0,026. Untuk tingkat produktivitas dan tingkat proporsi, nilai probabilitas > alpha 0,05 sehingga H_1 pada uji t ditolak. Namun, untuk tingkat partisipasi, nilai probabilitas < alpha 0,05 sehingga H_1 pada uji t diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel GDPPC merupakan penjelas yang menunjukkan hasil yang beragam terhadap variabel TE ketika dijabarkan dalam tiga ukuran penjelasnya.

Hasil uji F menunjukkan nilai *p-value* mendekati 0 dan lebih kecil dari signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,877. Nilai tersebut artinya kemampuan variabel independen dan variabel kontrol dalam menjelaskan variasi variabel dependen berada di angka 87,7%. Hasil pengujian kekokohan model (*robustness check*) dapat dilihat pada Lampiran 3.

Pengaruh Demografi terhadap *Tax Effort*

Penelitian ini menggunakan proksi *age dependency ratio* dalam konteks menguji seberapa besar pengaruh bonus demografi terhadap penerimaan pajak melalui *tax effort*. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk pengaruh karakteristik demografi terhadap *tax effort* adalah 0,10095. Nilai tersebut berada di atas tingkat signifikansi yakni 5% sehingga disimpulkan bahwa demografi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax effort*. Simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Le et al. (2008, 2012).

Le et al. (2008) menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), dengan hasil yang menunjukkan bahwa *age dependency ratio* cenderung menghasilkan koefisien yang tidak signifikan tetapi dengan arah yang sesuai hipotesis. Sedangkan, dalam Le et al. (2012) diperoleh bukti bahwa *age dependency ratio* menghasilkan arah pengaruh yang beragam dengan signifikansi yang beragam pula ketika menjelaskan *tax effort* dengan pendekatan penerimaan fiskal alih-alih penerimaan pajak. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *age dependency ratio* merupakan sebuah faktor

yang dapat mendistorsi kemampuan pengumpulan pajak negara.

Beberapa penelitian lain juga menggunakan *age dependency ratio* sebagai proksi alternatif dalam menjelaskan sifat demografi terhadap *tax effort*. Penelitian-penelitian tersebut memunculkan hasil yang beragam. Bahkan, *age dependency ratio* dapat menurunkan kontribusi populasi produktif sehingga berpengaruh negatif terhadap *tax effort* (Bird et al., 2014).

Cyan et al. (2013) berpendapat bahwa *age dependency ratio* menunjukkan arah koefisien yang beragam ketika model yang diajukan diuji dengan *fixed effect*. Menariknya, koefisien yang konsisten dengan hipotesis ditunjukkan ketika model diuji dengan *stochastic frontier analysis* mempertimbangkan faktor inefisiensi meskipun masih belum cukup signifikan pengaruhnya terhadap *tax effort*.

Hasil penelitian Dalamagas et al. (2019) dan Hendrani et al. (2020) menunjukkan bahwa *age dependency ratio* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax effort* dengan arah pengaruh yang berlawanan dengan hipotesis. Ketika model diuji dengan *autoregressive model*, maka arah pengaruh dan signifikansi sesuai dengan hipotesa.

Penelitian yang mengungkapkan korelasi antara PDB per kapita dengan penerimaan pajak di Indonesia dilakukan oleh Effendi et al. (2019). Pengujian tentang pengaruh bonus demografi terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara penerimaan pajak yang terkait langsung dengan demografi, terutama terkait penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor demografi dapat berpengaruh terhadap PDB per kapita dalam jangka panjang sehingga berpengaruh secara tidak langsung terhadap potensi pajak. Bonus demografi tidak serta merta menambah penerimaan pajak tetapi harus disikapi dengan strategi yang tepat agar tidak tersia-siakan. Salah satunya dengan memprioritaskan perluasan basis pajak untuk saat ini dan menjaga harapan pembayar pajak ketika tingkat partisipasi sudah lebih dominan.

Pengaruh *Governance Quality* terhadap *Tax Effort*

Model yang digunakan adalah *model regresi fixed effect least square* dengan *dummy variable*. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk *governance quality* terhadap *tax effort* adalah 0,14885. Nilai tersebut berada di atas tingkat signifikansi 5% sehingga disimpulkan bahwa *governance quality* yang diwakilkan dalam agregasi *WGI* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax effort*. Simpulan yang dihasilkan dalam

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Le et al. (2008, 2012). Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *governance quality* adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan penerimaan pajak.

Le et al. (2012) menggunakan regresi OLS dan terdapat potensi masalah dalam regresi pada variabel-variabel tertentu, seperti *governance quality* atau institusional. Terdapat kemungkinan endogenitas dan/atau masalah kausalitas ganda yang terkait dengan variabel institusional dan pendapatan pajak. Pajak yang lebih tinggi meningkatkan *governance* yang lebih baik selanjutnya dapat meningkatkan pajak. Meskipun Bird et al. (2014) dapat membuktikan bahwa endogenitas dalam model yang serupa dengan penelitian ini tidak ada.

Sementara itu, penelitian Alm & Martinez-Vazquez (2003) menggunakan konsep *governance* dan *institutional quality* sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam penerimaan pajak. Ukuran yang sering digunakan untuk menjelaskan *governance quality* diantaranya adalah *corruption index and bureaucratic quality* yang termasuk dalam *International Country Risk Guide* (ICRG) seperti pada Grigorian & Dovoodi (2007), Le et al. (2008, 2012), Javid & Arif (2012), Cyan et al. (2013) serta Bird et al. (2014).

Penelitian ini sendiri menggunakan nilai rata-rata dari WGI yang terdiri dari enam dimensi (*voice and accountability, political stability and absence of violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption*) disajikan dalam rentang -2,5 hingga +2,5.

Bird et al. (2008, 2014) juga menguji pengaruh *governance quality* baik dengan proksi ICRG maupun WGI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *governance quality* signifikan dan berpengaruh positif terhadap *tax effort*.

Beberapa penelitian terakhir yang dilakukan oleh Dalamagas et al. (2019) dan Elbahnasawy (2020) menggunakan variabel *governance quality* atau *institutional setting* seperti demokrasi, kerusuhan, karakter kabinet, stabilitas politik hingga perang di suatu kawasan. Hasilnya menunjukkan bahwa *governance quality* dan *institutional setting* secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap *tax effort*.

Untuk menguji kekokohan model, variabel *governance quality* yang awalnya menggunakan proksi dengan satu nilai tunggal, berupa rata-rata dari estimasi nilai keenam sub indeks WGI, diganti dengan nilai estimasi dari keenam sub indeks tersebut. Hasil dekomposisi menunjukkan bahwa arah pengaruh maupun signifikansi dari variabel GOV cenderung tidak berubah kecuali sub indeks

government effectiveness yang menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah negatif dan sub indeks *regulatory quality* yang menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah positif. Hasil pengujian kekokohan model (*robustness check*) dapat dilihat pada Lampiran 2.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PDB per kapita berpengaruh signifikan positif terhadap *tax effort* yang berarti semakin tinggi PDB per kapita maka semakin tinggi *tax effort*. Hal ini menunjukkan PDB per kapita yang dianggap merefleksikan tingkat perkembangan suatu negara menjadi faktor utama yang memengaruhi *tax effort*. Dalam asumsi tarif pajak progresif yang digunakan, maka semakin tingginya PDB per kapita diharapkan memperluas basis pajak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga berpengaruh ke *tax effort*.

Karakter demografi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax effort*. Penelitian ini menggunakan *age dependency ratio* sebagai ukuran proksi karakter demografi karena lebih relevan dengan bonus demografi yang diekspektasikan segera diperoleh Indonesia. Hal ini dapat dipahami bahwa *age dependency ratio* hanya dapat berpengaruh langsung pada pajak yang terkait langsung dengan demografis. Selain itu, manfaat bonus demografi tidak serta merta langsung berimbas pada penerimaan pajak namun harus dapat ditangkap dengan strategi yang tepat.

Good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax effort*. Penelitian ini menggunakan rata-rata dari estimasi nilai keenam sub indeks WGI sebagai ukuran proksi *good governance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Effendi et al. (2019) yang menyebutkan bahwa bonus demografi tidak secara otomatis menambah penerimaan pajak, tetapi harus disikapi dengan strategi yang tepat. Salah satunya dengan memprioritaskan perluasan basis pajak dan menjaga harapan (*tax morale*) pembayar pajak ketika tingkat partisipasi sudah lebih dominan.

Selain itu, di masa mendatang perlu dilakukan penelitian terhadap perkembangan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah di Indonesia. Beberapa penelitian terakhir menggunakan pendekatan *tax effort* untuk meningkatkan kapasitas pajak pemerintah daerah sebagaimana dilakukan oleh Vallés Giménez & Zárata Marco (2017) serta Miyazaki (2020).

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sampel terbatas pada negara anggota APEC dengan rentang waktu hanya selama

satu dekade (tahun 2008-2017). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini sesuai hasil pemilihan model adalah *fixed effect least square dummy variable* yang pengujiannya tidak mencakup endogenitas dan inefisiensi seperti pengujian alternatif lainnya. Selain itu penulis juga akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil penelitian termasuk *error* yang kemungkinan terjadi.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dan menguji berbagai variabel penjelas *tax effort* lainnya baik yang sudah teruji signifikan maupun tidak di penelitian sebelumnya untuk meningkatkan kualitas estimasi *tax effort* yang digunakan dalam perbandingan antar negara. Penelitian ini masih membuka ruang-ruang perbaikan sebagaimana dijelaskan dalam keterbatasan ruang lingkup.

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan kolega dosen PKN STAN, yaitu Rahmadi Murwanto, Supriyadi, Dyah Purwanti, Nurhidayati dan Ambang Aries Yudanto, yang telah memberikan kontribusi berupa sumbang saran dan kontribusi lainnya terhadap penyelesaian skripsi yang kemudian dikonversi menjadi jurnal. Jurnal ini telah diseminasikan kepada publik pada Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan tanggal 13-14 Desember 2021.

REFERENSI

- Agung, I. G. (2014). *Time series data analysis using eviews*. Jakarta: John Wiley & Sons.
- Alm, J., & Martinez-Vazquez, J. (2003). Institutions, paradigms, and tax evasion in developing and transition countries. *ECON Publication*, 146-178.
- Bahl, R. W. (1972). A representative tax system approach to measuring tax effort in developing countries. *International Monetary Fund*, 19(1), 87-124. <https://doi.org/10.2307/3866441>
- Bird, R. M., Martinez-Vasquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high income countries: The impact of corruption, voice and accountability. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 55-71. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50006-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50006-3)
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2014). Societal institutions and tax effort in developing countries. *Annals of Economics and Finance* 15-1, 185-230. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.662081>
- BPS. (2018). *Proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 hasil SUPAS 2015 (Edisi revisi)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brun, J.-F., & Diakite, M. (2016). Tax potential and tax effort : An empirical estimation for non-resource tax revenue and VAT ' s revenue. *Center D'etudes Et De Recherches Sur Le Developpement International*, 1-64.
- Cyan, M., Martinez-Vasquez, J., & Volovic, V. (2013). *Measuring tax effort: Does the estimation approach matter and should effort be linked to expenditure goals?* Georgia: ICEPP Working Papers, International Center for Public Policy.
- Dalamagas, B., Palaios, P., & Tantos, S. (2019). A new approach to measuring tax effort. *Economies*, 7(3), 1-25. <http://dx.doi.org/10.3390/economies7030077>
- Daude, C., Gutierrez, H., & Melguizo, A. (2013). What drives tax morale? A focus on emerging economies. *Review of Public Economics*, 207(4), 9-40. <http://dx.doi.org/10.7866/HPE-RPE.13.4.1>
- Effendi, Y., Hidayat, W., & Nurwanda, A. (2019). The impact of demographic transition on tax revenue in Indonesia. *Scientax*, 1(1), 92-108. <https://doi.org/10.52869/st.v1i1.8>
- Elbahnasawy, N. (2020). Democracy, political instability, and government tax effort in hydrocarbon-dependent countries. *Resources Policy*, 65, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101530>
- Feger, T., & Asafu-Adjaye, J. (2014). Tax effort performance in sub-Saharan Africa and the role of colonialism. *Economic Modelling*, 38, 163-174. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.12.020>
- Fenochietto, R., & Pessino, C. (2013). Understanding countries' tax effort. *IMF Working Paper*, 1-30.
- Garg, S., Goyal, A., & Pal, R. (2016). Why tax effort falls short of tax capacity in Indian states: A stochastic frontier approach. *Public Finance Review*, 45(2), 232-259. <https://doi.org/10.1177%2F1091142115623855>
- Golley, J., & Wei, Z. A. (2015). Population dynamics and economic growth in China. *China Economic Review* 35, 15-32. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2015.05.005>
- Hendrani, A., Ramdhani, D., Febriani, T., & Sriyani, S. (2020). Corporate tax avoidance: Kontribusi mekanisme corporate governance dan corporate social responsibility pada perusahaan industri manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek

- Indonesia tahun 2014-2018. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–132.
<https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.109-132>
- Jati, W. R. (2015). Bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi: Jendela peluang atau jendela bencana di Indonesia? *Populasi*, 26(1), 1–19.
<https://doi.org/10.22146/jp.8559>
- Javid, A. Y., & Arif, U. (2012). Analysis of revenue potential and revenue effort in developing Asian countries. *Pakistan Development Review*, 4(51), 365–379.
<http://dx.doi.org/10.30541/v51i41pp.365-380>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: methodology and analytical issue. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246.
<https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Le, T. M., Moreno-Dodson, B., & Bayraktar, N. (2012). *Tax capacity and tax effort : Extended cross-country analysis from 1994 to 2009*. Washington DC: The World Bank.
- Le, T. M., Moreno-Dodson, B., & Rojchaichanthorn, J. (2008). *Expanding taxable capacity and reaching revenue potential: Cross-country analysis*. Washington DC: The World Bank.
- Mawejje, J., & Sebudde, R. R. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. *Economic Analysis and Policy*, 63, 119–129.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005>
- Miyazaki, T. (2020). Intergovernmental fiscal transfers and tax efforts: Regression-discontinuity analysis for Japanese local governments. *Regional Science and Urban Economics*, 84, 1–46.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103554>
- Ndiaye, M. B. O., & Korsu, R. D. (2014). Tax effort in ECOWAS countries. In *Regional Economic Integration in West Africa*, 137-158. Springer, Cham.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01282-7_6
- Newton, K. (2017). Public services in cities and counties. In *Public Service Provision and Urban Development*, 19-43. Routledge.
- Piancastelli, M., & Thirlwall, A. P. (2021). The determinants of tax revenue and tax effort in developed and developing countries: Theory and new evidence 1996-2015. *Nova Economia*, 30, 871-892.
<http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/5788>
- Tanzi, V. (1992). *Structural factors and tax revenue in developing countries: A decade of evidence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development*. Harlow, Essex: Pearson.
- Vallés Giménez, J., & Zárata Marco, A. I. (2017). Tax effort of local governments and its determinants: The Spanish case. *Annals of Economics and Finance*, 18(2).

LAMPIRAN

Lampiran 1a Perbandingan *Tax Effort* Negara Anggota APEC 2008-2011

Kode	Negara	Tahun	T/Y	T'/Y	TE	Tahun	T/Y	T'/Y	TE
AUS	Australia	2008	26.87	26.01	1.03	2010	25.31	17.64	1.44
BRN	Brunei Darussalam	2008	42.10	25.99	1.62	2010	28.34	18.32	1.55
CAN	Kanada	2008	26.78	25.69	1.04	2010	26.46	18.43	1.44
CHL	Chile	2008	20.03	26.55	0.75	2010	18.25	18.65	0.98
CHN	Tiongkok	2008	16.95	26.22	0.65	2010	17.83	18.48	0.96
HKG	Hong Kong	2008	12.72	27.63	0.46	2010	13.54	18.12	0.75
IDN	Indonesia	2008	12.99	26.36	0.49	2010	11.23	17.97	0.62
JPN	Jepang	2008	16.76	26.43	0.63	2010	15.63	18.61	0.84
KOR	Korea	2008	19.27	24.91	0.77	2010	17.93	13.61	1.32
MEX	Meksiko	2008	10.64	26.43	0.40	2010	10.76	11.84	0.91
MYS	Malaysia	2008	14.20	28.25	0.50	2010	13.33	14.49	0.92
NZL	Selandia Baru	2008	32.90	21.07	1.56	2010	30.27	15.86	1.91
PER	Peru	2008	16.86	23.96	0.70	2010	15.90	14.81	1.07
PHL	Filipina	2008	14.40	28.26	0.51	2010	12.94	14.77	0.88
PNG	Papua Nugini	2008	18.42	27.35	0.67	2010	16.75	13.27	1.26
RUS	Russia	2008	28.99	26.72	1.09	2010	24.67	12.82	1.92
SGP	Singapura	2008	13.86	22.39	0.62	2010	12.98	12.28	1.06
THA	Thailand	2008	16.35	17.66	0.93	2010	15.93	13.72	1.16
TWN	Taiwan	2008	13.40	16.44	0.82	2010	11.50	13.45	0.86
USA	USA	2008	19.37	17.29	1.12	2010	17.36	11.87	1.46
VNM	Vietnam	2008	22.48	26.54	0.85	2010	22.39	12.22	1.83
AUS	Australia	2009	25.57	26.93	0.95	2011	25.93	12.75	2.03
BRN	Brunei Darussalam	2009	22.26	28.28	0.79	2011	35.59	12.55	2.83
CAN	Kanada	2009	27.55	26.27	1.05	2011	26.33	12.28	2.14
CHL	Chile	2009	15.91	26.02	0.61	2011	19.78	11.72	
CHN	Tiongkok	2009	17.01	25.69	0.66	2011	18.46	11.28	1.64
HKG	Hong Kong	2009	12.50	29.08	0.43	2011	14.22	10.38	1.37
IDN	Indonesia	2009	11.06	26.59	0.42	2011	12.17	10.74	1.13
JPN	Jepang	2009	15.33	26.78	0.57	2011	16.06	16.52	0.97
KOR	Korea	2009	18.21	28.04	0.65	2011	18.36	14.33	1.28
MEX	Meksiko	2009	10.31	19.36	0.53	2011	10.70	15.27	0.70
MYS	Malaysia	2009	14.47	17.68	0.82	2011	14.79	16.00	0.92
NZL	Selandia Baru	2009	30.25	18.43	1.64	2011	30.06	15.74	1.91
PER	Peru	2009	14.93	19.05	0.78	2011	16.72	16.86	0.99
PHL	Filipina	2009	13.08	19.97	0.66	2011	13.22	17.97	0.74
PNG	Papua Nugini	2009	15.67	19.52	0.80	2011	18.70	17.47	1.07
RUS	Russia	2009	23.92	18.52	1.29	2011	26.64	15.98	1.67
SGP	Singapura	2009	13.08	18.51	0.71	2011	13.27	16.91	0.78
THA	Thailand	2009	15.34	17.46	0.88	2011	17.62	18.55	0.95
TWN	Taiwan	2009	11.80	18.23	0.65	2011	12.40	17.03	0.73
USA	USA	2009	16.76	16.72	1.00	2011	18.43	17.96	1.03
VNM	Vietnam	2009	20.63	16.07	1.28	2011	21.86	18.50	1.18

Sumber: Diolah Penulis

Lampiran 1b Perbandingan *Tax Effort* Negara Anggota APEC 2012-2015

Kode	Negara	Tahun	T/Y	T'/Y	TE	Tahun	T/Y	T'/Y	TE
AUS	Australia	2012	26.95	18.97	1.42	2014	27.33	15.62	1.75
BRN	Brunei Darussalam	2012	31.48	18.97	1.66	2014	25.57	14.95	1.71
CAN	Kanada	2012	26.54	18.83	1.41	2014	26.65	14.60	1.83
CHL	Chile	2012	19.94	18.79	1.06	2014	18.19	15.30	1.19
CHN	Tiongkok	2012	18.60	19.06	0.98	2014	18.41	14.31	1.29
HKG	Hong Kong	2012	13.70	19.45	0.70	2014	15.46	13.45	1.15
IDN	Indonesia	2012	12.47	11.29	1.10	2014	12.05	14.45	0.83
JPN	Jepang	2012	16.48	10.68	1.54	2014	18.25	13.46	1.36
KOR	Korea	2012	18.65	11.16	1.67	2014	17.98	13.55	1.33
MEX	Meksiko	2012	10.56	11.69	0.90	2014	11.54	13.28	0.87
MYS	Malaysia	2012	15.61	11.54	1.35	2014	14.84	12.87	1.15
NZL	Selandia Baru	2012	31.64	11.52	2.75	2014	31.22	14.02	2.23
PER	Peru	2012	17.30	11.95	1.45	2014	16.95	15.54	1.09
PHL	Filipina	2012	14.07	12.22	1.15	2014	14.46	16.10	0.90
PNG	Papua Nugini	2012	18.52	12.26	1.51	2014	18.03	17.48	1.03
RUS	Russia	2012	26.04	12.76	2.04	2014	25.43	16.36	1.55
SGP	Singapura	2012	13.80	15.35	0.90	2014	13.71	18.18	0.75
THA	Thailand	2012	16.83	15.48	1.09	2014	17.06	17.90	0.95
TWN	Taiwan	2012	12.20	14.00	0.87	2014	12.20	17.04	0.72
USA	USA	2012	18.61	13.03	1.43	2014	19.79	15.65	1.26
VNM	Vietnam	2012	19.03	14.05	1.35	2014	18.22	15.61	1.17
AUS	Australia	2013	27.16	14.20	1.91	2015	27.92	16.49	1.69
BRN	Brunei Darussalam	2013	30.90	13.82	2.24	2015	13.83	16.79	0.82
CAN	Kanada	2013	26.44	14.43	1.83	2015	27.84	17.04	1.63
CHL	Chile	2013	18.43	14.39	1.28	2015	18.97	23.40	0.81
CHN	Tiongkok	2013	18.52	14.73	1.26	2015	17.87	21.66	0.82
HKG	Hong Kong	2013	13.38	34.36	0.39	2015	14.37	24.89	0.58
IDN	Indonesia	2013	12.48	29.83	0.42	2015	11.96	24.84	0.48
JPN	Jepang	2013	17.07	28.07	0.61	2015	18.56	25.99	0.71
KOR	Korea	2013	17.89	28.98	0.62	2015	18.47	26.52	0.70
MEX	Meksiko	2013	11.14	31.22	0.36	2015	13.73	25.85	0.53
MYS	Malaysia	2013	15.31	27.45	0.56	2015	14.28	25.28	0.56
NZL	Selandia Baru	2013	30.48	34.43	0.89	2015	31.57	24.73	1.28
PER	Peru	2013	17.11	35.86	0.48	2015	15.17	26.22	0.58
PHL	Filipina	2013	14.48	31.40	0.46	2015	14.55	12.79	1.14
PNG	Papua Nugini	2013	18.61	31.37	0.59	2015	16.03	11.88	1.35
RUS	Russia	2013	25.05	16.52	1.52	2015	22.80	12.92	1.76
SGP	Singapura	2013	13.43	15.42	0.87	2015	13.31	13.70	0.97
THA	Thailand	2013	18.32	16.17	1.13	2015	17.51	13.76	1.27
TWN	Taiwan	2013	12.00	16.21	0.74	2015	12.50	13.62	0.92
USA	USA	2013	19.48	16.57	1.18	2015	20.01	13.31	1.50
VNM	Vietnam	2013	19.12	16.34	1.17	2015	18.04	13.81	1.31

Sumber: Diolah Penulis

Lampiran 1c Perbandingan *Tax Effort* Negara Anggota APEC 2016-2017

Kode	Negara	Tahun	T/Y	T'/Y	TE	Tahun	T/Y	T'/Y	TE
AUS	Australia	2016	27.76	14.04	1.98	2017	21.92	11.62	1.89
BRN	Brunei Darussalam	2016	9.06	16.30	0.56	2017	11.23	18.87	0.60
CAN	Kanada	2016	27.85	16.69	1.67	2017	27.63	19.09	1.45
CHL	Chile	2016	18.72	15.94	1.17	2017	18.70	19.06	0.98
CHN	Tiongkok	2016	17.48	16.02	1.09	2017	17.78	17.81	1.00
HKG	Hong Kong	2016	13.57	15.30	0.89	2017	13.72	18.39	0.75
IDN	Indonesia	2016	11.56	15.58	0.74	2017	11.09	17.03	0.65
JPN	Jepang	2016	18.23	15.80	1.15	2017	11.63	18.41	0.63
KOR	Korea	2016	19.38	17.00	1.14	2017	19.98	19.65	1.02
MEX	Meksiko	2016	14.47	18.37	0.79	2017	14.02	20.98	0.67
MYS	Malaysia	2016	13.76	18.85	0.73	2017	12.95	21.06	0.62
NZL	Selandia Baru	2016	31.57	18.96	1.67	2017	31.98	18.90	1.69
PER	Peru	2016	14.05	13.83	1.02	2017	13.17	18.36	0.72
PHL	Filipina	2016	14.56	12.06	1.21	2017	15.14	18.48	0.82
PNG	Papua Nugini	2016	14.20	13.14	1.08	2017	14.30	18.28	0.78
RUS	Russia	2016	21.96	12.62	1.74	2017	24.17	18.62	1.30
SGP	Singapura	2016	13.72	12.72	1.08	2017	14.65	19.75	0.74
THA	Thailand	2016	16.94	12.53	1.35	2017	16.32	20.21	0.81
TWN	Taiwan	2016	12.70	11.88	1.07	2017	12.50	20.89	0.60
USA	USA	2016	19.66	11.74	1.67	2017	20.89	21.35	0.98
VNM	Vietnam	2016	17.95	11.17	1.61	2017	18.74	23.47	0.80

Sumber: Diolah Penulis

Lampiran 2 *Robustness Check* PDB per Kapita

Variable	Coef	Prob	Coef	Prob	Coef	Prob	Coef	Prob	Coef	Prob
C	1,464	0,480	-74,924	0,051	2,237	0,269	0,747	0,809	-61,444	0,077
GDPPC	0,205	0,037								
PROD			-0,027	0,857	-0,000	1,000				
PART			0,627	0,238			0,338	0,458		
WORGE			13,675	0,052					11,683	0,071
DEMOG	0,458	0,136	4,954	0,037	0,489	0,126	0,495	0,122	4,293	0,047
GOV	-0,830	0,040	-0,573	0,201	-0,514	0,264	-0,501	0,215	-0,621	0,128
SECTOR	-0,601	0,004	-0,684	0,003	-0,697	0,004	-0,695	0,003	-0,685	0,002
TRADE	0,367	0,007	0,422	0,003	0,369	0,007	0,369	0,006	0,418	0,002
R-squared	0,882		0,877		0,872		0,873		0,876	
Prob (F-statistic)	-		-		-		-		-	

Sumber: Diolah Penulis

Lampiran 3 Robustness Check Governance Quality

Variable	Coef	Prob.	Coef	Prob.	Coef	Prob.	Coef	Prob.	Coef	Prob.	Coef	Prob.	Coef	Prob.	Coef	Prob.	Coef	Prob.
C	1,464	0,480	-0,358	0,879	0,214	0,900	1,508	0,291	-1,018	0,541	0,686	0,672	-2,627	0,279	-2,027	0,370		
GDPPC	0,205	0,037	0,182	0,040	0,128	0,179	0,199	0,041	0,122	0,269	0,258	0,018	0,051	0,597	0,090	0,354		
DEMOG	0,458	0,136	0,747	0,037	0,521	0,094	0,718	0,034	0,472	0,142	0,475	0,130	0,498	0,122	0,567	0,112		
GOV	-0,830	0,040																
SECTOR			-0,176	0,241	-0,374	0,018												
TRADE			-0,766	0,013			-1,076	0,001										
CC			0,105	0,159							-0,054	0,492						
GE			-0,843	0,016														
PV			0,902	0,010														
RL			0,125	0,548														
RQ	-0,601	0,004	-0,571	0,001	-0,614	0,004	-0,556	0,002	-0,590	0,005	-	0,003	-0,571	0,005	-0,591	0,005		
VA	0,367	0,007	0,418	-	0,352	0,010	0,385	0,002	0,387	0,005	0,428	0,001	0,398	0,005	0,387	0,004		
R-squared	0,882		0,901		0,882		0,891		0,878		0,886		0,880		0,879			
Prob(F-statistic)	-		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000			

Sumber: Ditolah Penulis